

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI	iii
MOTTO	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR PERUNDANG-UNDANGAN	xii
DAFTAR GAMBAR	xiv
 BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	15
1.3 Tujuan Penelitian	15
1.4 Manfaat Penelitian	16
1.5 Metode Penelitian	16
1.5.1 Tipe Penelitian	16
1.5.2 Pendekatan Masalah	16
1.5.3 Sumber Bahan Hukum	20
1.5.4 Pengumpulan Bahan Hukum	21
1.5.5 Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum	21
1.6 Sistematika Penulisan	21
 BAB II RATIO LEGIS PENGATURAN PENGGANTIAN ANTAR WAKTU DALAM UNDANG-UNDANG PARTAI POLITIK	
2.1 Landasan Keberadaan Partai Politik	25
2.2 Sistem Pemilihan Umum	31

2.3	Status Keanggotaan Partai Politik	41
2.4	Pengertian, Alasan, dan Dasar Hukum Penggantian Antar waktu	46
2.5	Kewenangan Partai Politik Dalam Melakukan Penggantian Antar Waktu	56
2.6	Prosedur Penyelesaian Sengketa Penggantian Antar Waktu	62

BAB III PEMBATALAN KEPUTUSAN PENGGANTIAN ANTAR WAKTU YANG TELAH FINAL ATAS PUTUSAN MAHKAMAH PARTAI ATAU PENGADILAN BERDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 39/PUU-XI/2013

3.1	Keputusan pimpinan partai politik dalam melakukan penggantian antar waktu yang menjadi objek perkara di mahkamah partai atau pengadilan berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PUU-XI/2013	70
3.2	Kedudukan mahkamah partai dalam menangani sengketa internal partai politik	76
3.3	Kontradiksi putusan mahkamah partai maupun putusan pengadilan terhadap putusan penggantian antar waktu yang telah final dan kemungkinan terjadinya pembatalan keputusan penggantian antar waktu yang telah final	84

BAB IV PENUTUP

4.1	Kesimpulan	100
4.2	Saran	102

DAFTAR BACAAN

DAFTAR PERUNDANG-UNDANGAN

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 208)

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801). Sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang partai politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568).

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 182).

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 02 Tahun 2010 Tentang Pedoman Teknis Verifikasi Syarat Calon Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Daerah Pemilihan Umum Tahun 2009.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2010 Tentang Pedoman Teknis Verifikasi Syarat Calon Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Hasil Pemilihan Umum.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pencalonan Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

